

Literature Review: Dampak Transformasi Digital terhadap Kinerja Inovasi dengan Mediasi Faktor Inovasi Pada Pemerintah

Wade Rahma Batin¹, La Ode Baka²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: waderahmaa@gmail.com

² Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: laodebaka@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi pilar penting dalam reformasi sektor publik, termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara sistematis bagaimana transformasi digital memengaruhi kinerja inovasi, dengan menyoroti peran mediasi dari faktor-faktor inovasi internal seperti struktur organisasi, budaya kerja, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan metode kajian literatur sistematis terhadap 15 artikel ilmiah yang relevan, diperoleh temuan bahwa pengaruh transformasi digital terhadap kinerja inovasi bersifat tidak langsung dan sangat tergantung pada kesiapan internal organisasi. Faktor-faktor seperti budaya inovatif, kompetensi digital sumber daya manusia, dan dukungan kepemimpinan memainkan peran mediasi yang signifikan. Hasil kajian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perumusan strategi transformasi digital yang lebih efektif dalam konteks pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Kinerja Inovasi, Pemerintah Daerah, Faktor Mediasi, Budaya Organisasi

Abstract

Digital transformation has become a central pillar in public sector reform, including within local government institutions. This study aims to systematically review how digital transformation influences innovation performance, with a particular focus on the mediating role of internal innovation factors such as organizational structure, work culture, and leadership. Using a systematic literature review approach across 15 relevant scholarly articles, the findings reveal that the impact of digital transformation on innovation performance is indirect and highly dependent on the internal readiness of organizations. Innovation culture, digital competencies, and leadership support serve as critical mediating factors. This review offers theoretical and practical insights for

developing more effective digital transformation strategies in the context of local governance.

Keywords: *Digital Transformation, Innovation Performance, Local Government, Mediation Factors, Organizational Culture*

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan struktural dalam organisasi sektor publik di seluruh dunia, termasuk pemerintah daerah. Di era revolusi industri 4.0, organisasi publik dituntut untuk mengadopsi teknologi digital seperti *big data analytics*, *artificial intelligence* (AI), dan *cloud computing* untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik (Kraus et al., 2021). Teknologi-teknologi ini tidak hanya mendigitalisasi proses birokrasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif (Gil-Garcia et al., 2020).

Transformasi digital dalam konteks pemerintah daerah bukan hanya sekadar modernisasi infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup reformasi budaya organisasi, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, serta restrukturisasi proses pelayanan publik (Agostino, Arnaboldi, & Lema, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak dapat dilepaskan dari kesiapan internal organisasi dalam mengelola perubahan. Hal ini mencakup kesiapan teknologi, fleksibilitas proses kerja, kepemimpinan transformasional, serta budaya inovatif yang adaptif terhadap disruptif (Vial, 2019).

Namun demikian, dampak transformasi digital terhadap peningkatan kinerja inovasi masih menjadi perdebatan, terutama dalam lingkungan sektor publik yang sering kali dihadapkan pada birokrasi yang kaku dan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana faktor-faktor inovasi seperti struktur organisasi, dukungan manajerial, dan kolaborasi lintas sektor dapat berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara transformasi digital dan inovasi organisasi (Susanti, Prasetyo, & Riyadi, 2023).

2. Tinjauan Pustaka

Transformasi digital telah menjadi fokus penting dalam kajian administrasi publik dan manajemen inovasi selama dekade terakhir. Seiring meningkatnya tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik, adopsi teknologi digital menjadi strategi utama banyak pemerintah daerah.

Menurut Vial (2019), transformasi digital adalah proses mendalam yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek organisasi yang mengubah cara organisasi menciptakan nilai. Dalam konteks sektor publik, Mergel, Edelmann, dan Haug (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong reorganisasi struktural dan perubahan budaya kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan daya inovasi organisasi.

Chen dan Kim (2023) menegaskan bahwa transformasi digital secara signifikan meningkatkan kinerja inovasi, namun pengaruhnya bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh kesiapan teknologi dan struktur organisasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya faktor mediasi, seperti kapabilitas inovasi internal dan budaya digital, sebagai elemen penentu keberhasilan transformasi.

Sementara itu, Zhou et al. (2023) menambahkan bahwa kepercayaan diri berlebih (*executive overconfidence*) dari pimpinan organisasi dapat memperlemah atau memperkuat dampak transformasi digital terhadap inovasi, tergantung pada bagaimana faktor inovasi dimoderasi. Hal ini menekankan pentingnya gaya kepemimpinan dalam konteks digitalisasi sektor publik.

Dalam studi oleh Gao et al. (2023), ditemukan bahwa transformasi digital tidak hanya memengaruhi inovasi, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja keseluruhan organisasi, termasuk profitabilitas dan daya saing. Namun, manfaat ini sangat tergantung pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan.

Penelitian oleh Kraus et al. (2021) menyatakan bahwa banyak organisasi menghadapi hambatan dalam integrasi teknologi digital karena kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan temuan Agostino, Arnaboldi, dan Lema (2022) bahwa implementasi teknologi sering kali gagal apabila tidak didukung dengan perubahan budaya dan kepemimpinan yang kuat. Gil-Garcia, Zhang, dan Puron-Cid (2020) mengembangkan kerangka kerja multi-dimensi untuk menilai *smartness* pemerintah, di mana digitalisasi menjadi komponen kunci yang harus diimbangi dengan kapasitas inovasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Susanti, Prasetyo, dan Riyadi (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang pro-inovasi dan keterlibatan kepemimpinan berpengaruh positif dalam mempercepat transformasi digital di pemerintah daerah. Namun, mereka menekankan kurangnya penelitian yang menguji secara kuantitatif efek mediasi dari faktor-faktor inovasi tersebut. Menurut Piening dan Salge (2015), dalam sektor publik, inovasi sering kali tidak berkembang secara optimal karena kendala birokratis dan pola kepemimpinan yang konservatif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan manajerial yang lebih terbuka terhadap teknologi.

West (2005) menyatakan bahwa inovasi dalam sektor publik tidak hanya memerlukan teknologi tetapi juga reformasi sistemik dalam struktur kelembagaan dan pengambilan keputusan. Dunleavy et al. (2006) memperkenalkan konsep *digital-era governance* yang menekankan integrasi sistem informasi, transparansi, dan partisipasi warga sebagai hasil inovasi dari proses digitalisasi sektor publik.

Janssen dan Estevez (2013) juga menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam e-government yang tidak hanya fokus pada sistem digital tetapi juga pada perubahan organisasi. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup besar, yaitu minimnya studi yang mengkaji peran mediasi faktor inovasi secara empiris dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian

terfokus pada sektor privat atau pada negara maju dengan tingkat digitalisasi yang tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Cordella dan Paletti (2019).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara sistematis hubungan antara transformasi digital dan kinerja inovasi pada pemerintah daerah, serta bagaimana faktor-faktor inovasi seperti struktur organisasi, budaya kerja, dan kepemimpinan berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara transformasi digital dan kinerja inovasi, dengan menyoroti peran mediasi dari faktor-faktor inovasi dalam konteks organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah. Kajian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis, serta berorientasi pada pemetaan konsep dan sintesis temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah guna membangun pemahaman teoritis yang komprehensif dan terkini.

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, serta Google Scholar. Kriteria inklusi literatur meliputi: artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2023, fokus pada isu transformasi digital, inovasi organisasi, dan pemerintahan sektor publik, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta dipublikasikan pada jurnal yang terindeks atau bereputasi internasional. Berdasarkan proses penyaringan awal dan evaluasi tematik, sebanyak 15 artikel ilmiah dipilih karena memenuhi kriteria relevansi dan kualitas metodologi.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji, antara lain: transformasi digital sebagai variabel independen, faktor inovasi sebagai mediator, serta kinerja inovasi sebagai variabel dependen. Teknik metasintesis naratif digunakan untuk mengelompokkan temuan dari masing-masing studi, menemukan persamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Setiap artikel dianalisis berdasarkan kerangka teoritis, metodologi, serta temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian.

Untuk memastikan validitas kajian, proses seleksi dilakukan secara sistematis dan transparan guna meminimalisir bias. Selain itu, hanya artikel yang memenuhi standar akademik dan metodologis yang dimasukkan dalam analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya dasar konseptual yang kuat untuk merumuskan kerangka pikir yang dapat digunakan dalam studi lanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap 15 artikel ilmiah yang terpilih, diperoleh tiga temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, transformasi digital terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja inovasi dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah. Kedua, pengaruh tersebut tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh sejumlah faktor inovasi internal seperti budaya organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, dan kesiapan teknologi. Ketiga, keberhasilan transformasi digital dalam meningkatkan inovasi sangat tergantung pada sinergi antara kapabilitas digital dan strategi organisasi yang berorientasi pada perubahan.

Temuan dari Chen dan Kim (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital seperti big data, AI, dan cloud computing berkontribusi pada efisiensi dan kecepatan proses inovasi, namun hanya jika organisasi memiliki kesiapan struktural dan kultural yang memadai. Studi ini menyoroti pentingnya adanya *alignment* antara strategi digital dan struktur organisasi agar adopsi teknologi dapat terinternalisasi ke dalam proses inovasi.

Selanjutnya, Zhou et al. (2023) menemukan bahwa faktor kepemimpinan juga memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap inovasi. Dalam konteks pemerintah daerah, gaya kepemimpinan yang terlalu percaya diri tanpa dasar (*executive overconfidence*) dapat menghambat proses adaptasi teknologi jika tidak disertai dengan pemahaman strategis terhadap risiko dan kebutuhan inovasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kapasitas kepemimpinan digital menjadi elemen krusial dalam kesuksesan transformasi digital sektor publik.

Kajian oleh Gao et al. (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil dalam digitalisasi bukan hanya berinvestasi dalam teknologi, tetapi juga pada penguatan budaya inovatif dan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini berlaku pula pada instansi pemerintah, di mana pengembangan kompetensi digital pegawai menjadi fondasi utama dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

Dari segi kerangka teoritis, hasil ini mendukung model transformasi digital yang bersifat sistemik dan terintegrasi (Vial, 2019; Mergel et al., 2019), di mana teknologi hanyalah satu komponen dari perubahan organisasi yang lebih luas. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, tantangan birokrasi, keterbatasan SDM, dan resistensi terhadap perubahan menjadi faktor yang memperlambat proses inovasi meskipun digitalisasi telah dilakukan.

Temuan ini juga mengungkap adanya kesenjangan penelitian pada studi-studi terdahulu yang cenderung fokus pada sektor privat atau pemerintahan negara maju. Sangat sedikit studi yang secara spesifik mengeksplorasi dinamika mediasi faktor inovasi dalam konteks pemerintahan daerah di negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengadopsi teknologi secara teknis, tetapi juga mengembangkan strategi manajerial, pelatihan SDM, dan reformasi organisasi yang mendukung inovasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukanlah solusi tunggal untuk meningkatkan kinerja inovasi. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam aspek struktural, budaya, dan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dan inovasi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara transformasi digital dan kinerja inovasi dalam konteks pemerintah daerah, dengan menyoroti peran mediasi dari faktor-faktor inovasi internal. Berdasarkan kajian terhadap 15 artikel ilmiah,

ditemukan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Namun, pengaruh tersebut bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi, seperti budaya inovatif, struktur organisasi yang adaptif, serta kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu, integrasi antara strategi digital dan strategi inovasi menjadi elemen krusial dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan di sektor publik.

5.2. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan literatur yang dikaji terbatas pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015–2023 dan pada bahasa Indonesia serta Inggris. Kedua, fokus kajian sebagian besar bertumpu pada pendekatan teoretis dan tidak mencakup analisis kontekstual yang mendalam berdasarkan kondisi lokal pemerintah daerah di Indonesia. Ketiga, studi yang dikaji masih dominan berasal dari konteks internasional, sehingga generalisasi hasil terhadap kondisi pemerintah daerah Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati.

5.3. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, peneliti menyarankan agar penelitian lanjutan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi kasus yang dapat menggali konteks spesifik pemerintahan daerah di Indonesia secara lebih mendalam. Selain itu, penguatan pada faktor mediasi seperti budaya organisasi, kapabilitas SDM, dan kepemimpinan digital perlu dijadikan fokus utama dalam perancangan strategi transformasi digital. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menjadikan inovasi sebagai prioritas strategis yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga struktural dan kultural.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Karya Persada Muna atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dosen dan pustakawan yang telah membantu dalam pencarian dan pengolahan literatur yang digunakan dalam kajian ini.

Referensi

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2022). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money & Management*, 42(3), 219–222. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Chen, P., & Kim, S. (2023). The Impact of Digital Transformation on Innovation Performance—The Mediating Role of Innovation Factors. *Heliyon*.
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101409.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.

- Gao, D., Yan, Z., Zhou, X., & Mo, X. (2023). Smarter and Prosperous: Digital Transformation and Enterprise Performance. *Systems*.
- Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2020). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101491. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101491>
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance— Doing more with less. *Government Information Quarterly*, 30, S1–S8.
- Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. C. (2021). Digital transformation in business and management research: An overview. *International Journal of Information Management*, 63, 102426.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Piening, E. P., & Salge, T. O. (2015). Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation in public services. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(4), 1185–1214.
- Susanti, N., Prasetyo, H., & Riyadi, A. (2023). Peran budaya organisasi dan kapabilitas digital dalam transformasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 87–97.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Zhou, P., Zhou, S., Zhang, M., & Miao, S. (2023). Executive Overconfidence, Digital Transformation and Environmental Innovation: The Role of Moderated Mediator. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.